

Rencana Kerja Akhir 2025



Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena dapat menyusun Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 yang merupakan salah satu kegiatan rutin Satuan Polisi Pamong Praja pada setiap tahun.

Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tahun lalu, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2025. Dokumen Rencana Kerja Akhir ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala selama satu tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023-2026 Kabupaten Barito Kuala

Kami menyadari baik bentuk, isi dan cara penyajian Rencana Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja akan kami terima dengan baik

Demikian Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 ini dibuat, semoga bisa menjadi bagian dari rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah dimasa yang akan datang.

Marabahan, 5 Juli 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja,



MUHAMMAD SYA'RAWI, SSTP
NIP. 198204142001121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja	28
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja..	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	51
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja.....	54
3.3 Program dan Kegiatan	56
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.....	69
BAB V PENUTUP	78

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Akhir SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Akhir SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun..

Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak tahapan awal penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Proses penyusunan Renja dimulai dengan adanya surat edaran dari Sekretaris Daerah, yang menegaskan bahwa tiap Perangkat Daerah wajib membentuk Tim Penyusun Renja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

Tim Penyusun tersebut kemudian bekerja menyusun Rencana Kerja dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang di masyarakat.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan Visi dan Misi yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026, maka Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi Ke 1 yaitu :

“Terwujudnya Barito Kuala yang adil Maju dan Madiri berbasis Agribisnis dengan misi mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan pengelolaan SDA dan Sumber Daya Lainnya untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan”.

1.2 Landasan Hukum

Penyusun Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 berlandaskan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
7. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 11. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 12. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
 13. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
18. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala
19. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026
21. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

22. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ /KUM/2023 Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Lingkup Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.

1.3 Maksud dan tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2025, sedangkan tujuannya sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Akhir Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang**
- 1.2. Landasan Hukum**
- 1.3. Maksud dan Tujuan**
- 1.4. Sistematika Penulisan**

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Analisis Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6 Penetapan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Satuan Polisi Pamong
Praja

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA**

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta targetkinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Barito Kuala melaksanakan 3 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Tingkat capaian target kinerja program/ kegiatan sampai dengan keadaan bulan Desember tahun 2023 dapat terealisasi fisik **99.75%** dan prosentasi penggunaan Keuangan sebesar **96,99 %**. Dari pagu anggaran kegiatan tahun 2023 sebesar **Rp. 9.712.197.957,00** dan anggaran yang terealisasi sebesar **Rp. 9.419.981.873,00** Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai .

Pada tahun 2023 Sampai Dengan bulan Desember Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 pada bulan Desember/ Triwulan IV berdasarkan Indikator Kinerja Program dan kegiatan yang sudah sesuai dengan PMD 90/2019 sebagai berikut :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota**

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja (TPP) sampai dengan bulan Desembertahun 2023 dan terealisasi sebesar Rp 5.838.560.444,00 (95,80%) dari Pagu sebesar Rp 5.593.112.857,00

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan**

Belanja Bimtek sampai bulan Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 37.002.930,00 (99,25 %) dari pagu sebesar Rp. 37.281.000,00

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 46.960.500,00 untuk belanja/biaya alat tulis kantor 10 jenis Dengan Realisasi fisik sebanyak 10 Jenis (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.957.650,00 (99,99%).

Penyediaan bahan logistik kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 91.170.000,00 untuk belanja/biaya makan dan minum harian pegawai, rapat dan rapat tamu sebanyak 13.434 porsi. Dengan Realisasi fisik sebanyak 13.114 porsi (97,62%) dan keuangan sebesar Rp. 87.720.000,00 atau 96,22 %

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 23.525.080,00, Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetak dan penggandaan 7 Jenis. Dengan Realisasi fisik 7 Jenis atau (100%) dan Rp. 23.316.890,00 atau (99,12%).

Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 339.841.825,00, Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI Satuan Polisi Pamong Prajake provinsi dan luar provinsi sebanyak 90 Laporan. Dengan Realisasi fisik 100 % sebesar Rp. 339.305.920,00 atau. 99,84 %.

3. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 66.873.000,00 untuk pengadaan Kendaraan dinas 2 Unit, dan terealisasikan sebanyak 2 unit 100,00 % dan keuangan sebesar Rp. 60.691.000, (90,76%).

Pengadaan Mebel

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 31.107.450,00 untuk pengadaan kursi, lemari, filing dan meja Kerja 36 Unit dan terealisasikan sebanyak 36 unit 100 % dan keuangan sebesar Rp. 30.940.000,00 (99,46%).

Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 26.270.000,00 untuk pengadaan Kipas angin 3 Laptop 1 dan Printer 2 Unit dan terealisasikan sebanyak 8 unit 100 % dan keuangan sebesar Rp. 38.450.000,00 (98,75%).

4. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyediaan Jasa Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 28.329.600,00 kegiatan ini melaksanakan 12 Laporan , dengan realisasi 12 laporan (100%) dan keuangan sebesar Rp. 27.029.600,00 (95,41%).

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran langganan listrik dan air PDAM selama 12 bulan . Dengan Realisasi sebesar Rp. 24.742.066,00 atau 63,44 %

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 12.855.248,00. Kegiatan

ini melaksanakan pembayaran jasa kebersihan kantor 12 Bulan.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 12.269.800,00 atau 95,45 %

5. Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 278.490.600,00. Kegiatan ini

melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4

sebanyak 17 unit. Dengan Realisasi sebesar Rp. 277.190.794,00

atau 99,53%

Pemeliharaan rutin /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 160.409.800,00. Kegiatan ini

melaksanakan pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 Unit.

Dengan Realisasi sebesar Rp. 158.766.300,00 atau 98,98%

B. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 458.702.600,00. Kegiatan ini berupa kegiatan penertiban sepanjang jalan kabupaten barito kuala sebanyak 20 Laporan. Dengan Realisasi sebesar Rp. 458.099.770,00 (99,87%).

Penindakan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 695.431.725,00. Kegiatan ini berupa kegiatan Pengawasan kabupaten barito kuala sebanyak 7 Laporan. Dengan Realisasi sebesar Rp. 687.631.725,00 (98,88%).

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 170.838.475,00 sebanyak 30 Dokumen. Dengan Realisasi sebesar Rp. 170.333.640,00 (99,70%).

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 84.998.085,00 sebanyak 12 Dokumen. Dengan Realisasi sebesar Rp. 84.591.261,00 (99,52%).

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 340.091.900,00 sebanyak 610 Orang. Dengan Realisasi sebesar Rp. 338.286.898,00 (99,47%).

Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 311.321.825,00 sebanyak 4 Dokumen. Dengan Realisasi sebesar Rp. 309.159.775,00 (99,31%).

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 99.965.325,00 sebanyak 12 Laporan. Dengan Realisasi sebesar Rp. 99.791.025,00 (99,83%).

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 97.843.745,00 sebanyak 12 Laporan. Dengan Realisasi sebesar Rp. 97.652.325,00 (99,80%).

**C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN**

**1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun
Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 419.661.980,00 sebanyak 4 Dokumen. Dengan Realisasi sebesar Rp. 416.939.647,00 (99,35%).

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Pergeseran/perubahan anggaran akibat penambahan anggaran sehingga mempengaruhi pada target yang akan direalisasikan.
Pembagian anggaran/persediaan kas kegiatan yang seyogyanya dilaksanakan pada triwulan I dan II tidak dapat dilaksanakan pada triwulan IV yang dikarenakan antara lain :

Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang anggarannya dihapus, dikurangi, ditunda dan digeser pelaksanaannya ke triwulan III dan IV untuk menyesuaikan waktu, prioritas dan azas manfaatnya, sehingga dengan sisa pagu anggaran yang ada dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.

Berikut ini diuraikan beberapa program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, antara lain :

Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sampai dengan keadaan bulan Desember 2023, realisasi sebesar 728 bulan (100 %) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.593.112.857,- (95,80%)

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan keadaan bulan Desember 2023, realisasi sebesar 3 bulan (100 %) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.002.930,- (99,25%)

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sampai dengan bulan Desember 2023, realisasi fisiknya 10 Paket (100 %) dan realisasi keuangan Rp. 46.957.650,- (99,99%).
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik sampai dengan bulan Desember 2023, realisasi fisiknya 12.987 Paket (97,62%) dengan realisasi Keuangan Rp. 87.720.000,-(96,22%)
- Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Sampai dengan keadaan bulan Desember 2023, realisasi secara fisik 7 Paket (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.316.890,- (99,12%).
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Selain beberapa permasalahan yang telah diuraikan di atas tadi, Sampai dengan keadaan bulan Desember 2023, realisasi secara fisik 90 Laporan (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 339.305.920,- (99,84%). Di karenakan penambahan anggaran pada perubahan bulan September dan direalisasikan pada triwulan III dan IV

Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi fisik 100% dengan realisasi

keuangan Rp. 60.691.000,00 atau (90,76%) karena kegiatan ini penambahan anggaran dan di realisasikan di Triwulan III

- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan Rp. 30.940.000,00 atau (99,46%) karena kegiatan ini penambahan anggaran dan d realisasikan di Triwulan IV
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan Rp. 38.450.000,00 atau (98,75%) karena kegiatan ini penambahan anggaran dan d realisasikan di Triwulan IV

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Sampai dengan keadaan bulan Desember 2023, realisasi secara fisik 12 Laporan (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.029.600,- (95,41%).
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sampai dengan keadaan bulan Desember 2023, realisasi secara fisik 12 Laporan (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.742.066,- (63,44%).
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor Sampai dengan keadaan bulan Desember 2023, realisasi secara fisik 12

Laporan (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.
12.269.800,- (99,45%).

Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi fisik 16 Unit (94,12%) dengan realisasi keuangan Rp. 277.190.794,- atau (99,53%)
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sampai dengan bulan Desember 2023 realisasi fisik 1 Unit (100%) dengan realisasi keuangan RP. 158.766.300,- (98,98%)

PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN /KOTA

- Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan sampai dengan bulan Desember 2023 dengan realisasi fisik 18 Laporan dan realisasi keuangan Rp. 458.099.770,00 (99,87%).
- Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui

Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sampai dengan bulan Desember 2023 dengan realisasi fisik 18 Laporan dan realisasi keuangan Rp. 687.631.725,0 (98,88%).

- Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Desember 2023 realisasi fisik 7 Laporan. Kegiatan dan realisasi keuangan Rp. 170.333.640.000,- (99,70%)
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai bulan Desember 2023 dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 84.591.261,-(99,52%).
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia sampai bulan Desember 2023 dengan realisasi Fisik 99,67% dan realisasi keuangan Rp. 338.286.898,00 (99,47%)
- Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sampai bulan Desember 2023 realisasi Fisik 4 Dokumen dan realisasi Keuangan Rp. 241.517.099,- (77,58%)

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

- Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sampai bulan Desember 2023 dengan realisasi Fisik 12 Laporan atau 100% dengan realisasi Keuangan Rp. 99.791.025,- (99,83%)
- Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sampai dengan bulan Desember 2023 dengan realisasi Fisik 12 Laporan atau 100% dan realisasi keuangan Rp. 97.652.325,- (99,80%)

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sampai bulan Desember 2023 dengan realisasi fisik 5 Dokumen atau 100% dan realisasi keuangan Rp. Rp416.939.647,- (99,35%)
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan belum ada karena realisasi anggaran masih dibawah 90 %

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 39.000.000,00. Kegiatan ini melaksanakan pembayaran langganan listrik dan air PDAM selama 12 bulan Dengan Realisasi sebesar Rp. 24.742.066,00 atau 63,44 % karena tagihan langganan listrik pembayarannya menurut besarnya pemakaian

- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi/memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan belum ada karena realisasi anggaran belum ada 100% %
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan :

Dari uraian di atas di ketahui sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, 3 (Tiga) program 8 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang keluarannya tidak mencapai 100%. Dikarenakan beberapa sebab antara lain : program dan kegiatan tersebut belum selesai di SPJkan (realisasi sampai bulan Desember 2023), penambahan / pengurangan anggaran dan terjadi pergeseran anggaran kas pada triwulan berjalan dan target.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah.

Implikasinya dalam capaian program renstra perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Prajasangat mendukung dalam pencapaian program dan

kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dapat menunjang sarana dan prasarana Aparatur di Satuan Polisi Pamong Praja. Maka dengan adanya sarana penunjang akan meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan Maklumat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan sesuai target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja.

Akan tetapi pada pelaksanaan tahun ini, beberapa kegiatan yang ada tidak mencapai target yang ditetapkan.

- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Kebijakan yang perlu diambil yaitu dengan memaksimalkan anggaran yang ada guna tercapainya kegiatan yang sudah direncanakan, dan melakukan perubahan target untuk menyesuaikan dengan anggaran tersebut.

- f. Terdapatnya pembayaran yang disesuaikan hari kerja dan sesuai tagihan

Dari Penjelasan tersebut dapat digambarkan pada tabel 2.1 (Capaian Realisasi Tahun Sebelumnya), sebagai berikut ini:

Tabel 2.1
Capaian Realisasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023 Sampai Triwulan IV berdasarkan target Indikator kinerja program dan kegiatan

No	PMDN 90/2019 Kegiatan – Sub Kegiatan	Indikator	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%) Triwulan IV	
					Fisik	Keuangan
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset dan Pelaporan	7.033.342.297,00	6.757.495.807,00	100%	96,08%
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.838.560.444,00	5.593.112.857,00	100%	85,64%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.838.560.444,00	5.593.112.857,00	100%	95,80%
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Aset dan Pelaporan	37.281.000,00	37.002.930,00	100%	99,25%
	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.281.000,00	37.002.930,00	100%	99,25%
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	501.497.405,00	497.300.460,00	99,40%	98,79%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46.960.500,00	46.957.650,00	100%	99,99%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	91.170.000,00	87.720.000,00	97,62%	96,22%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23.525.080,00	23.316.890,00	100%	99,12%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0	0	0,00%	0,00%
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	339.841.825,00	339.305.920,00	100%	99,84%

		SKPD				
	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.918.200,00	130.081.000,00	100%	96%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	66.873.000,00	60.691.000,00	100%	90,76%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	31.107.450,00	30.940.000,00	100%	99,46%
	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan Mesinyang tersedia	38.937.750,00	38.450.000,00	100%	98,75%
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.184.848,00	64.041.466,00	100%	84,77%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.329.600,00	27.029.600,00	100%	95,41%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	39.000.000,00	24.742.066,00	100%	63,44%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.855.248,00	12.269.800,00	100%	99,45%
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.900.400,00	435.957.094,00	97,47%	99,25%
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	278.490.600,00	277.190.794,00	94,12%	99,53%
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	160.409.800,00	158.766.300,00	100%	98,98%
II	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan dengan kondisi Tenram dan Tertib	2.259.193.680,00	2.245.546.419,00	99,97%	99,64%
	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan dengan kondisi Tenram dan Tertib	2.061.384.610,00	2.048.103.069,00	99,95%	99,46%

	Sub Kegiatan : Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	458.702.600,00	458.099.770,00	100%	99,87%
	Sub Kegiatan : Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	695.431.725,00	687.631.725,00	100%	98,88%
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	170.838.475,00	170.333.640,00	100%	99,70%
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	84.998.085,00	84.591.261,00	100%	99,52%
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	340.091.900,00	338.286.898,00	99,67%	99,47%
	Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	311.321.825,00	309.159.775,00	100%	99,31%
	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	197.809.070,00	197.443.350,00	100%	99,82%
	Sub Kegiatan : Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	99.965.325,00	99.791.025,00	100%	99,83%

		Peraturan Bupati/Wali Kota				
	Sub Kegiatan : Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	97.843.745,00	97.652.325,00	100%	99,80%
III	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penanggulangan Kebakaran	419.661.980,00	416.939.647,00	100%	99,35
	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Kebakaran	419.661.980,00	416.939.647,00	100%	99,35
	Sub Kegiatan : Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	419.661.980,00	416.939.647,00	100%	99,35%

Tabel 2.2 (T.C.29)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja S/D Tahun 2023 (bulan Desember)
Kabupaten Barito Kuala**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Berdasarkan PMDN 90)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target kinerja Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022 (tahun n-3)	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu S.D Septemberi (2023) (tahun-2)			Target program / kegiatan (Renja PD tahun berjalan 2024 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		Catatan
					Target renja PD tahun 2023 (n-2)	Realisasi renja PD tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*	12
1											
1	05										
1.05.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan aset dan Perencanaan/Pelaporan	100%								
1.05.01.205.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan yang sesuai SAP dan tepat waktu	1								
01.20.5.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2912	728	728	728	100%	728	1456	50%	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	0	0	0	0%	0	0	0%	
01.20.5.1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	1							0%	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4	0	0	0	0%	1	1	25%	
1.05.01.205.1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persenatse realisasi Administrasi Kepegawaian	100%						0	0%	
01.20.5.1.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah PNS yg ditugaskan mengikuti Bintek/ Diklat	79	20	3	3	100%	2	27	34%	
1.05.01.2.02.01	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi umum	100%							0%	
1.05.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	0	0	0	0%	3	3	33%	
1.05.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	67	20	10	10	100%	19	29	43%	
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35199	6212	13434	13114	9762%	7255	26.548	75%	

1.05.01.2.06.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	28	7	7	7	100%	7	14	50%	
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian yang tersedia	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	138	70	90	90	100%	12	102	73%	
1.05.01.2.06.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Pengadaan BMD	100	56	14	10	71%		0	0%	
1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	0	2	2	100%	1	3	100%	
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	41	0	36	36	100%	0	36	87%	
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27	2	8	8	100%	2	10	37%	
1.05.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	0	0	0	0	2	2	100%	
1.05.01.2.07.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	0	0	0	0%	9	0	0%	

1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	12	12	12	100%	12	24	50%	
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	12	12	12	100%	12	24	50%	
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	12	12	12	100%	12	24	50%	
1.05.01.2.08.04	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	100%						0	0%	
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	68	18	17	17	100%	14	31	45,58%	
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1	1	1	100%	1	2	50%	
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18	0	0	0	0	6	6	33,33%	

1.05.01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	0	0	0	0%	2	2	25%	
1.05.01.2.09.09	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kecamatan yang tentram dan Terib	100%						0	0%	
1.05.02	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	72%						0	0%	
1.05.02.2.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	80	20	20	20	100%	20	40	50%	
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	28	0	7	7	100%	7	14	50%	
1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	120	27	30	30	100%	30	60	50%	

1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42	12	12	12	100%	6	18	42,88%	
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1930	0	610	610	100%	100	710	36,79%	
1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	16	4	4	4	100%	4	8	50%	
1.05.02.2.01.07	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada	65%						0	0%	
1.05.02.2.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	48	12	12	12	100%	12	24	50%	
1.05.02.2.02.02	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	48	12	12	12	100%	12	24	50%	

1.05.02.2.02.03	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persenatse Penanggulangan Bahaya Kebakaran	65%						0	0%	
1.05.04	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persenatse Penanggulangan Bahaya Kebakaran	65%						0	0%	
1.05.04.2.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	20	4	5	5	100%	4	9	45,%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala yang telah tertuang dalam Rencana Kerja RPD Kabupaten Barito Kuala 2023-2026 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah

1. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan dengan Indikator Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator Nilai Sakip Satpol PP

Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan indikator sasaran Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP

Indikator kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator sasaran Nilai SAKIP Satpol PP

Untuk mengukur indikator tersebut di atas, metode yang dilakukan akan disajikan pada tabel analisis pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Prajadengan format tabel 3. (T-C.30) Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Barito Kuala sebagai berikut :

Tabel 2.3

T-C.30 PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala

NO	Indikator	SPM / standar nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	Tahun 2022 (tahun n-2)	Tahun 2023 (tahun n-1)	Tahun 2024 (tahun n)	Tahun 2025 (tahun n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah program yang direalisasikan			100	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Kecamatan dengan kondisi tentram dan tertib			72	100	100	100	81,69				
3	Persentase Kecamatan yang diawasi			60	100	100	100	81,69				
4	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran			75	100	100	100	133,33				
5	Persentase Kepatuhan Masyarakat di Kecamatan Terhadap Perda dan Perkada				100	100	100	106,23				

6	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				10	10	10					
7	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				7	7	7					
8	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				18	18	18					
9	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6	6	6					
10	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				100	100	100					
11	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4	4	4					

12	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				6	6	6					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				6	6	6					
13	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				4	4	4					
14		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			100	100	100					
15		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			100	100	100					
16		Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu Tanggap (response time) penanganan kebakaran			100	100	100					

17			Persentase pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100						
18			Persentase anggota Satlinmas yg telah ditingkatkan kapasitasnya	80	80	80						
19			Jumlah aparatur terkait kebencanaan di provinsi/kabupaten/kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	30	30	30						
20			Persentase ketersediaan Posko Linmas tingkat kab/kota	23	80	23						
21			Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam provinsi/kabupaten/kota yang ditangani	100	100	100						
22			Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	100	100	100						

23		Persentase Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional		80	80	80					
24		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan, penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan		1	1	1					
25		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		100	100	100					
26		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum provinsi yang ditetapkan		4	4	4					
27		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS		5	5	5					

28			Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas kabupaten/kota		4	4	4					
29			Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana		100	100	100					
30			Jumlah personil TRC tingkat provinsi yang ditingkatkan kapasitas teknis manajerial		2	2	2					
31			Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur		1	1	1					
32			Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya		8	8	8					
33			Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan		30	30	30					

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pada tabel berikut dapat dilihat rincian teknik pengumpulan data serta teknik monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap indikator sasaran.

Pencapaian indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 ditunjukkan oleh tabel 5 berikut ini :

Tabel 2.5

Pengukuran Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023
(s.d bulan Desember 2023)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	%	50%	54,21%	108%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja	%	70%	76,37%	109%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran belum mencapai target tahun 2023.

Capaian sasaran Meningkatkan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 ini juga didukung dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yakni :

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan.

2. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
6. Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
7. Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali KotaProgram Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
8. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota
9. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Capaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja ini juga didukung dari kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yakni :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Sub Kegiatan nyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan
10. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
11. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
14. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
17. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
19. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Perjalanan selama kurang lebih 5 (Lima) tahun, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala telah melalui beberapa fase perkembangan yang terus meningkat, melalui Pengawasan dan pengendalian atas sasaran strategis yaitu meningkatnya penyelesaian Pelanggaran K3 . Isu Strategis yang berkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, yang dapat kami uraikan sebagai isu strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya pelanggaran dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah.
2. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten barito Kuala

Analisis capaian kinerja ini untuk menginstrumenkan masalah serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan baik faktor eksternal maupun internal. Berdasarkan analisis capaian kinerja dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, maka faktor internal dan eksternal tersebut dirumuskan beberapa hal penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala antara lain:

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Profesionalitas Aparatur

Perlunya peningkatan pendidikan dan pelatihan yang memadai dimana Pengetahuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala masih perlu ditingkatkan, melihat tuntutan tugas yang diemban kedepan semakin berat. Perlunya mempunyai sikap mental yang baik dimana motivasi kerja dan disiplin serta penguasaan bidang tugas masih rendah, serta masih banyak yang belum mengerti dan memahami akan segala aturan-aturan yang ditegakan.

2. Kurangnya jumlah Personil

Tidak memadainya jumlah personil yang ada dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk, hal ini dapat diukur dari kriteria perhitungan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota.

3. Belum tersedianya pos jaga di titik-titik penjagaan
4. Kurangnya jumlah personil/SDM yang kompeten
5. Sarana dan Prasarana yang ada tidak maksimal mendukung kegiatan lapangan
6. Belum adanya ruang khusus untuk proses penyidikan
7. Masih belum maksimal untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di jalur Hijau/ Badan jalan

Adapun kriteria perhitungannya adalah sebagai berikut :

Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/ Kota, sesuai pasal 11 ayat b, maka jumlah pegawai (Satpol-PP) Kabupaten Barito Kuala mestinya sebanyak 251 sampai 350 pegawai. Sedangkan jumlah yang ada hanya berjumlah 80 personil, dengan persentasi masih kekurangan personil yaitu mencapai 68% dari jumlah minimal yang ditetapkan sekitar 251 orang. Akibatnya pengawasan dan monitoring serta operasional lainnya kurang maksimal pencapaian pelaksanaannya.

1. Penempatan Personil

Penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala saat ini masih belum sesuai kebutuhan dan dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan dan kesehatan serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS paada umumnya, oleh karena itu kedepan diperlukan pengadaaan formasi khusus dan sistem penempatan dan pembinaan karier secara khusus pula (yang ada saat ini asal ditempatkan saja tidak ada seleksi dan uji kompetensi serta tes psikolog).

2. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai.

Identifikasi permasalahan juga dilakukan dengan menggunakan Analisis Lingkungan Strategis (ALS) dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berupaya mengenal dan mempelajari Lingkungan Internal Organisasi berupa Kekuatan dan Kelemahan, dan Lingkungan Eksternal Organisasi berupa Peluang dan

a. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Barito Kuala

Analisis kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2025 ditetapkan sesuai dengan Permendagri 90 tahun 2019 melalui proses internal tanpa mengesampingkan usulan Program dan Kegiatan dari Bidang-bidang Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada prinsipnya tidaklah jauh berbeda.

Rancangan awal Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 ini sudah dianggarkan sesuai Kebutuhan dan sesuai program dan kegiatan yang ada di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja walaupun untuk program dan kegiatan harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019. Untuk Perbandingan anggaran antara rancangan awal rencana kerja dan kesesuaian pagu Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa ditetapkan karena untuk ketetapan Pagu anggaran belum ada. Jadi untuk membandingkan antara rancangan awal tahun 2025 dengan kesesuaian kebutuhan belum bisa dibandingkan, dapat dilihat pada table 2.6 T-C. 31 Permendagri 86 tahun 2017 di bawah ini :

Tabel 2.6

T-C.31 PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017

**Tabel TC. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Barito Kuala**

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.413.343.750					10.088.122.467	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.413.343.750	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				10.088.122.467	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Marabahan	Persentase realisasi administasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pelaporan	100%	8.108.415.480	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Marabahan	Persentase realisasi administasi umum, kepegawaian, keuangan, aset dan perencanaan/pel	100%	8.655.949.927	

								aporan				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Marabahan	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu	1 Dok	6.750.743.221	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Marabahan	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu	1 Dok	8.086.414.087		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Marabahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 Orang	6.741.243.221	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Marabahan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	56 Orang	8.072.714.047		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Marabahan	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Lap	9.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Marabahan	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Lap	13.700.040		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Marabahan	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%	39.801.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Marabahan	Persentase Administrasi Kepegawaian	100%	0		

	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta dan Bandung'	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undang	18 Orang	39.801.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jakarta dan Bandung'	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undang	0 Orang	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Marabahan	Persentase Administrasi Umum	100%	690.198.411	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Marabahan	Persentase Administrasi Umum	100%	266.050.740	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Marabahan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	19 Paket	51.835.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Marabahan	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	10 Paket	30.834.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Marabahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	7255 Paket	184.670.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Marabahan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	17234 Paket	72.450.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Marabahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Marabahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	500.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Marabahan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Paket	11.624.090	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Marabahan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang	7 Paket	5.637.640	

								disediakan			
	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru, Jakarta, Bandung	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Laporan	440.568.821	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banjarbaru, Jakarta, Bandung	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	70 Laporan	156.628.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Marabahan	Persentase Pengadaan BMD	100%	30.250.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Marabahan	Persentase Pengadaan BMD	100%	0	
	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan Roda 4	Marabahan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Marabahan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	0 Unit	0	
	Pengadaan Mebel	Marabahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20 Paket	30.250.000	Pengadaan Mebel	Marabahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 Paket	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Marabahan	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Paket	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Marabahan	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0 Paket	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Marabahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	2 Paket	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Marabahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	13 Paket	-	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Marabahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	85.264.848	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Marabahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100%	75.486.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Marabahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	28.329.600	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Marabahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	15.600.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Marabahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	44.080.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Marabahan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	44.080.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah	Marabahan	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12.855.248	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah	Marabahan	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	15.806.500	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Marabahan	Persentase BMD yang terpelihara		512.158.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Marabahan	Persentase BMD yang terpelihara		227.998.600	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Marabahan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	453.568.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Marabahan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	18 Unit	207.113.600	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Marabahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	46.589.400	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Marabahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	19.425.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Marabahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Marabahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.460.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Marabahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	6.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Marabahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	2 Unit	0	
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Barito Kuala	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	65%	1.817.540.310	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Barito Kuala	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	100%	1.377.403.050	

	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kecamatan yang diawasi	100%	1.669.731.390	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kecamatan yang diawasi	100%	1.229.568.050	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kec.Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, Mandastana	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24 Laporan	71.138.000	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Kec.Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, Mandastana	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	24 Laporan	205.775.750	
	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Marabahan	Jumlah Laporan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	7 Laporan	737.604.925	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Marabahan	Jumlah Laporan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang	7 Laporan	678.600.000	

								Dilakukan Penindakan			
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kec. Tamban, Alalak dan Mandastana.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	18 dokumen	137.358.975	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Kec. Tamban, Alalak dan Mandastana .	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	18 dokumen	143.177.875	
	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar.	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	55.091.965	Pemberdayaan Perindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar.	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	55.080.725	

	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar.	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	610 Orang	340.091.900	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar.	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	610 Orang	65.068.950	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Marabahan Alalak, Anjir Muara, dan Anjir Pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelak+F25:F3Osana an Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	328.445.625	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Marabahan Alalak, Anjir Muara, dan Anjir Pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pelak+F25:F3 Osanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 dokumen	81.864.750	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kecamatan yang diawasi	100%	147.808.920	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kecamatan yang diawasi	100%	147.835.000	

	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kabupaten Barito Kuala	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	49.965.175	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kabupaten Barito Kuala	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	49.993.300	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kabupaten Barito Kuala	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	97.843.745	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Kabupaten Barito Kuala	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 Laporan	97.841.700	
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Marabahan	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	1.487.387.960	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Marabahan	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	54.769.490	

	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Marabahan	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	1.487.387.960	Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Marabahan	Persentase Penanggulang an Kebakaran dan Non Kebakaran	100%	54.769.490	
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Marabahan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penang gulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	1.487.387.960	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kot a	Marabahan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enanggulang an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya	4 Dokum en	54.769.490	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023-2026 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Selain berdasar pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada, renja Satuan Polisi Pamong Praja juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan dan musrenbang, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan disajikan pada tabel 2.7 (T-C- 32):

Tabel 2.7

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Barito Kuala Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel C -32

N o	Program Kegiatan	Lokasi	Indikat or Kinerja	Besaran/Vo lume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				
	Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemada man, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
1	Aliansyah	RT 07, Kab. Barito Kuala Anjir Muara		1	TUFOKSI BPBD Karena Peruntukkann ya tidak digunakan dilingkungan pemukiman secara langsung
2	MAHYUNI	Desa Samuda RT'01-06,		1	Pertimbanga n Prioritas 1 Kecamatan 1

		Kab. Barito Kuala Belawang			Bantuan
3	SYAMSURI	desa belawang rt.04 kec.belawa ng kuala, Kab. Barito Kuala		1	Disetujui
4	Syahbuddin	Jl. H.M Yunus, Kab. Barito Kuala Cerbon		1	Pertimbanga n Prioritas 1 Kecamatan 1 Bantuan
5	Padli	Desa Sungai Kambat, Kab. Barito Kuala Cerbon		1	Disetujui
6	SULAIMAN	Desa Tinggiran Darat, Kab. Barito Kuala Mekarsari		1	TUFOKSI BPBD Karena Peruntukann ya tidak digunakan dilingkungan pemukiman secara langsung
7	Ahmad Raini	RT 04, Kab. Barito Kuala Kec.		1	Disetujui

		Rantau Badauh			
8	MISRAN	Sungai Gampa Asahi RT.01 - 12, Kab. Barito Kuala Kec. Rantau Badauh		1	Pertimbangan Prioritas 1 Kecamatan 1 Bantuan _{nj}
9	UNTUNG KHODORI,M.Pd.I	Desa Kolam Kiri, Kab. Barito Kuala Wanaraya		1	Disetujui

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPD dan Renstra, sedangkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Rancangan Awal Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

Arah kebijakan Nasional Tahun 2020-2025 sesuai arahan Presiden Adalah :

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur

3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transpormasi Ekonomi

Arah kebijakan satu terdiri atas

- a. tingkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (penurunan Kematian ibu dan stunting)
- b. akses dan kualitas air minum dan sanitasi layak
- c. pendidikan dan pelatihan Vokasi
- d. penguatan bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran

Arah kebijakan dua sampai dengan lima terdiri atas :

- a. Melanjutkan dan menyambungkan pembangunan Infrastruktur dengan kawasan produksi dan sektor unggulan
- b. penguatan ekonomi kreatif dan digital
- c. memperkuat stabilitas dan mitigasi bencana

Sesuai arah kebijakan nasional tersebut di atas, maka Satpol PP dalam merumuskan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang harus mendukung dan merealisasikannya sesuai dengan kebutuhan daerah.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

Terkait dengan kebijakan nasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur Pemerintah Daerah, Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2025 masih tetap memprioritaskan pada penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui aksesibilitas terhadap infrastruktur, peningkatan pengelolaan pelayanan infrastruktur, dan peningkatan SDM dan Kelembagaan, yang akan dilakukan melalui :

- Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat.
- Penyediaan dan penambahan fasilitas pelayanan.
- Meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan.
- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi serta mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan dan pertanian.
- Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi guna untuk kelancaran informasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mewujudkan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 , yaitu :

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator Nilai Sakip Satpol PP

Adapun sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 dengan indikator Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP

Indikator Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dalam mendukung visi dan misi Kabupaten tersebut di atas, akan disajikan pada tabel 3.1 berikut ini :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Utama	Satuan
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan	Persentase Tingkat Penyelesaian K3	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	Persentase Tingkat Penyelesaian K3	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Persen
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai Sakip Satpol PP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP	Nilai Evaluasi SAKIP SKPD	Nilai

Tabel 3.2

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Tujuan dan Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barito Kuala

Tujuan RPD	Sasaran RPD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kegiatan
VISI : BARITO KUALA 2025 YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS				
Misi Ke-1				
Mewujudkan perekonomian daerah yang maju guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada potensi dan keunggulan local dengan mengoptimalkan Pengelolaan SDA untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan				
TEMA : Memacu Pendapatan dan Peningkatan Kualitas Daya Saing Daerah dengan SUB TEMA : Optimalisasi Pendapatan dalam Rangka Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi				
Meningkatkan Aktivitas ekonomi masyarakat yang tertib melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi produk unggulan daerah, dalam rangka membuka peluang kerja yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah Pencegahan dan Penanggulanga	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Keindahan	'Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3	Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan, Pengamanan, Pencegahan dan Penanggulangan
				Koordinasi Pengamanan dan Pencegahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Koordinasi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan, Penindakan Perda Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
				Koordinasi Penanggulangan Kebakaran UPT Pemadam Kebakaran
		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

n				
---	--	--	--	--

3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 ditunjang dengan 3 Program, 9 Kegiatan dan 28 sub kegiatan dengan Hasil Pemuktahiran Pemetaan Permendagri 90 tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (pembayaran TPP ASN selama 52 Orang).

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 laporan

1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (ASN yang mengikuti bimtek sebanyak 4 orang).

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan sebanyak 10 Paket).
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (penyediaan makan minum pegawai dan rapat selama 12 bulan sebanyak 2 Paket).

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan sebanyak 1 paket
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 3 Paket untuk 12 Bulan.
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sebanyak 12 Laporan perjalanan dinas ke dalam dan luar provinsi.
- 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional sebanyak 0 unit.
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pembelian 0 Paket
 - Pengadaan Mebel 0 Paket
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, pembelian AC 0 Paket
- 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat, melaksanakan pembayaran tenaga harian lepas selama 12 bulan untuk 2 Orang administrasi surat menyurat 504 OH dan pembelian biaya materai 10.000 sebanyak 12 laporan
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 Laporan.
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pembelian alat kebersihan 5 jenis dan tenaga kebersihan 252 OH selama 12 Laporan.

- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk kendaraan dinas operasional Sebanyak 18 Unit
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, membayar jasa tenaga keamanan 360 OH (petugas jaga malam kantor) sebanyak 1 Unit.
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya digunakan untuk membayar pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 2 unit

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 2.1 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan sebanyak 12 Kasus
 - Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebanyak 6 Laporan

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota sebanyak 4 Dokumen.
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebanyak 12 Dokumen
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia, sebanyak 30 Orang
- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebanyak 4 Dokumen.

2.2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota.

- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota sebanyak 12 Laporan.
- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota sebanyak 12 Laporan

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

3.1 Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, melakukan pemadaman kebakaran bekerja sama dengan instansi lain dan instansi swasta sebanyak 4 Dokumen dan Lomba Damkar
- Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran lengkap

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3 (Tabel T-C.33) berikut ini :

**Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 (Sesuai PMDN 90 Tahun 2019 dan Inmendagri 70 Tahun 2021)**

Kabupaten Barito Kuala

**Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong
Praja**

T-C. 33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025 (tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 (tahun n+1)			
				target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				10.088.122.467				9.740.863.977		
1	05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			10.088.122.467				9.740.863.977		
1	05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Keuangan Sesuai SAP yang tepat Waktu	Marabahan	71 Nilai	8.655.949.927	DAU	81 Nilai	7.723.545.707	
1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan Tepat waktu	Marabahan	1 Lap	8.072.714.047	DAU	1 Lap	6.589.098.469

1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Marabahan	56 Orang	8.072.714.047	DAU		56 Orang	6.589.098.469
1	5	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu	Marabahan	1 Lapoarn	13.700.040	DAU		1 Lapoarn	9.500.000
1	05	01	2.02		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Marabahan	1 Lap	13.700.040	DAU		1 Lap	9.500.000
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Realisasi kepegawaian	Marabahan	100%	0	DAU		100%	39.801.000
1	05	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti bimbingan teknik implementasi peraturan perundang-undang	Jakarta dan Bandung'	18 Orang	0	DAU		18 Orang	39.801.000
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi administrasi Umum	Marabahan	100%	266.050.740	DAU		100%	460.534.590

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan	Marabahan	19 Paket	30.834.600	DAU		19 Paket	51.835.500
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Marabahan	7255 Paket	72.450.00	DAU		7255 Paket	184.670.000
1	05	01	2.06		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Marabahan	3 Paket	500.000			3 Paket	1.500.000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Marabahan	7 Paket	5.637.640	DAU		7 Paket	11.624.090
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Banjarbaru, Jakarta, Bandung	12 Laporan	156.628.500	DAU		12 Laporan	210.905.000
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi BMD	Marabahan	100%	0	DAU		100%	30.250.000
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	Marabahan	0 Unit	0	DAU		0 Unit	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Marabahan	0 Paket	0	DAU		20 Paket	30.250.000

1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Marabahan	0 Paket	0	DAU		5 Paket	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Marabahan	0 Paket	0	DAU		2 Paket	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Penyediaan Jasa Penunjang	Marabahan	100%	75.486.500	DAU		100%	82.203.648
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Marabahan	12 Laporan	15.600.000	DAU		12 Laporan	26.218.800
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Marabahan	12 Laporan	44.080.000	DAU		12 Laporan	44.080.000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Daerah	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Marabahan	12 Laporan	15.806.500	DAU		12 Laporan	11.904.848
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara	Marabahan		227.998.600	DAU			512.158.000

1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Marabahan	18 Unit	207.113.600	DAU		18 Unit	453.568.600
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilitasi	Marabahan	1 Unit	19.425.000	DAU		1 Unit	46.589.400
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Marabahan	2 Unit	1.400.000	DAU		4 Unit	6.000.000
1	05	01	2.09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Marabahan	0 Unit	0	DAU		2 Unit	6.000.000
1	05	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	Kabupaten Barito Kuala	65	1.377.403.050	DAU		100%	1.817.540.310
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan yang diawasi	Kabupaten Barito Kuala	100%	1.229.568.050	DAU		100%	1.669.731.390

1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kec.Alalak, Anjir Muara, Anjir Pasar, Mandastana	12 Laporan	205.775.750	DAU		24 Laporan	71.138.000
					Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Marabahan	6 Laporan	678.600.000	DAU		7 Laporan	737.604.925
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Kec. Tamban, Alalak dan Mandastana.	4 dokumen	143.177.875	DAU		18 dokumen	137.358.975

1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar.	12 Dokumen	55.080.725	DAU		12 Dokumen	55.091.965
					Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Mandastana Alalak, Anjir Muara dan Anjir Pasar.	30 Orang	65.068.950	DAU		610 Orang	340.091.900
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelak+F25:F30sanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Kec. Marabahan Alalak, Anjir Muara, dan Anjir Pasar	4 dokumen	81.864.750	DAU		4 dokumen	328.445.625
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase Kecamatan yang diawasi	Kabupaten Barito Kuala	100%	147.835.000	DAU		100%	147.808.920

1	05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Kabupaten Barito Kuala	12 Laporan	49.993.300	DAU		12 Laporan	49.965.175
1	05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Kabupaten Barito Kuala	12 Laporan	97.841.700	DAU		12 Laporan	97.843.745
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3	Marabahan	65	54.769.490	DAU		100%	199.777.960
1	05	04	2.01		Pencegahan , Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan , dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Marabahan	100%	54.769.490	DAU		100%	199.777.960

1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Marabahan	4 Dokumen	54.769.490	DAU		4 Dokumen	199.777.960
---	----	----	------	----	--	--	-----------	-----------	------------	-----	--	-----------	--------------------

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Program Satuan Polisi Pamong Praja merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk Optimalisasi dalam rangka

peningkatan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor public memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Prajaya mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam satu tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

Kelompok Sasaran adalah sekumpulan sasaran yang mempunyai tujuan interaksi satu sama lain untuk mencapai tujuan program dalam kurun waktu yang ditentukan.

Indikator Sasaran adalah alat ukur spesifik menggambarkan target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Kuala namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Prov, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Selanjutnya rencana program dan kegiatan diuraikan dalam format Draf Rancangan awal Rencana Renja sebagaimana tabel terlampir.

Satuan Polisi Pamong Prajatelah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong PrajaTahun 2023 - 2026 yang memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja.

Program dan Kegiatan

Rencana kerja Akhir dan pendanaan Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Barito Kuala pada Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan. Untuk rencana Kerja Program dan kegiatan serta Pendanaan Satuan Polisi Pamong PrajaTahun 2025.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja (TPP) 1 tahun dengan anggaran sebesar Rp. 8.072.714.047,00

Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD selama 12 bulan dengan 1 laporan dengan anggaran Rp. 13.700.040,00

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Belanja bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan 0 Orang dengan anggaran sebesar Rp. 0,00

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.834.600,00 untuk belanja/biaya alat tulis kantor 10 paket

Penyediaan bahan logistik kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 72.450.000,00 untuk belanja/biaya makan dan minum harian pegawai, rapat dan rapat tamu sebanyak 2 paket.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 500.000,00 untuk belanja alat listrik sebanyak 1 Paket

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.637.640,00 Kegiatan ini melaksanakan penyediaan barang cetak dan penggandaan 3 Paket .

Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 156.628.500,00 Kegiatan ini melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait dengan TUPOKSI Satuan Polisi Pamong Praja ke provinsi dan luar provinsi sebanyak 12 Laporan

Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau lapangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 0,00 Kegiatan ini melaksanakan pengadaan kendaraan dinas operasional 0 unit.

Pengadaan Mebel

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 0,00, melaksanakan pembelian kursi dan meja 0 unit dan.

Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 0,00 untuk pengadaan Komputer 0 Unit dan printer 0 unit.

4 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyediaan Jasa Menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.600.000,00 kegiatan ini melaksanakan belanja materai 10 Laporan dan belanja jasa administrasi perkantoran 1 orang/504 OH.

Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 44.080.000,00 . Kegiatan ini melaksanakan pembayaran langganan listrik dan air PDAM selama 12 Laporan .

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.806.500,00 . Kegiatan ini melaksanakan pembelian peralatan kebersihan dan pembayaran jasa kebersihan kantor 1 orang sebanyak 12 Laporan

5 Pemeliharaan BMD penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas atau operasional.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 207.113.600,00. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 sebanyak 18 unit.

Pemeliharaan rutin /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 19.425.000,00 1 unit. Kegiatan ini melaksanakan pembelian obat semprot 5 botol dan pembayaran jasa petugas jaga malam 1 Orang .

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.400.000,00 2 unit. Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan Laptop dan Pc. Unit.

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 0,00. 0 unit' Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan AC .

B. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawala

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 205.775.750,00. Kegiatan ini adalah melakukan patroli dan penertiban pada wilayah kecamatan guna mencegah terjadinya pelanggaran Perda atau Perkada, selain itu juga

melakukan penertiban pada pelanggar Perda atau Perkada yang melakukan aktivitas sebanyak 12 Laporan.

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Kegiatan ini merupakan petugas pengendali keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dibayarkan setiap bulan untuk melakukan penertiban dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dianggarkan sebesar Rp. 678.600.000,00 sebanyak 6 Laporan

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Kegiatan pengamanan pada kegiatan Kepala daerah atau wakil Kepala Daerah dan pejabat lainnya yang mana untuk memberikan rasa aman dan nyaman serta dapat berlangsungnya kegiatan dengan tertib dan terkendali sebanyak 4 Dokumen dianggarkan Rp. 143.177.875,00

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan ini melakukan pembentukan Satlinmas di Kecamatan dalam rangka partisipasi masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat sebanyak 12 Dokumen dianggarkan sebesar Rp. 55.080.725

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kegiatan Pelatihan Satlinmas yang ada di Kecamatan atau desa dalam rangka peningkatan kapasitas Satlinmas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan setempat sebanyak 30 Orang dianggarkan sebesar Rp. 65.068.950,00.

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan kerjasama instansi terkait ataupun pihak keamanan lainnya seperti Kepolisian maupun TNI dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 4 dokumen dianggarkan sebesar Rp. 81.864.750,00

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan bagi masyarakat atau badan usaha yang diduga melanggar Perda atau Perkada sebanyak 12 Laporan dianggarkan sebesar Rp. 49.993.300,00

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Kegiatan melakukan penyelidikan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Perda atau Perkada sebanyak 12 Laporan dianggarkan sebesar Rp. 97.841.700,00

**C. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini melakukan pembinaan pencegahan bahaya kebakaran melalui Pembinaan APAR pada Instansi , Kecamatan, penanggulangan kebakaran dan pelatihan anggota Pemadam Kebakaran dan kegiatan Lomba Ketangkasan Damkar sebanyak 4 Dokumen dan Alat Pemadam Kebakaran dianggarkan sebesar Rp. 54.769.490,00

BAB V

PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Rencana Kerja Akhir Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Renstra yang telah dibuat, menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Selain sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, Rencana Kerja Akhir juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

Jumlah program kegiatan-sub kegiatan pada tahun 2025 adalah 3 program, 9 kegiatan, dan 28 sub kegiatan dengan jumlah pagu Rp 10.088.122.460,00

Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, maka ditetapkan kaidah –kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Di dalam Penyusunan Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang.

- b. Di dalam penyusunan Rencana Kerja Akhir Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Inmendagri 70 tahun 2021
- c. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum.
- d. Terwujudnya kondisi tertib dengan cara menyelesaikan setiap pelanggaran Perda yang dilaporkan
- e. Adanya dukungan Kepala Daerah melalui Peraturan Bupati Kab.Barito Kuala yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi,tugas fungsi dan uraian tugas serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas
- g. Melakukan koordinasi dengan Forcopimcam dalam pelaksanaan pengamanan dan keamanan di wilayah Kecamatan

Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatkan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

- b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, sehingga berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai menjadi berimbang.
- c. Menerapkan system reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
- d. Meningkatkan peran serta Aparatur Sipil Negara yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- e. Operasi di lapangan dalam bentuk razia, penertiban, pembinaan, patroli rutin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran perda dan gangguan trantibum.
- b. Koordinasi dengan para Camat se Kabupaten Barito Kuala dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Barito Kuala
- c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai penambahan SARPRAS
- d. Melakukan Sosialisai tentang Perda dan Perkada di lingkungan Sekolah se Kabupaten Barito Kuala

- e. Melakukan kegiatan Patroli Malam di tempat-tempat keramaian dan RTH di Kabupaten Barito Kuala
- f. Melakukan penertiban terhadap PKL di jalur hijau
- g. Mengikuti Diklat PPNS
- h. Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



MUHAMMAD SYA'RAWI, S.STP

Pembina TK. I / IVb

NIP. 198204142001121001

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA KAB. BARITO KUALA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA							10.088.122.467,00							9.740.863.977,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.088.122.467,00							9.740.863.977,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						10.088.122.467,00							9.740.863.977,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Nilai Evaluasi SAKIP SKPD</i>	71 Nilai			71 Nilai	8.655.949.927,00						71 Nilai	7.723.545.707,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Kinerja yang disampaikan tepat waktu</i>	-			1 Laporan	13.700.040,00			-	Meningkatn ya Tata Kelola Pem erintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP	-	9.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				1 Laporan	13.700.040,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Marabahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatn ya Tata Kelola Pem erintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP	-	9.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Keuangan</i>	-			100 Persen	8.072.714.047,00			-	Meningkatn ya Tata Kelola Pem erintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP	-	6.589.098.469,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				52 Orang/bulan	8.072.714.047,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Marabahan Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		6.589.098.469,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	-	-	39.801.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				0 Orang	0,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	-		39.801.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum</i>	-			100 Persen	266.050.740,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP	-	460.534.590,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	500.000,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		1.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	30.834.600,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		51.835.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	72.450.000,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		184.670.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				3 Paket	5.637.640,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		11.624.090,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			12 Laporan	156.628.500,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		210.905.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
							-	0,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	-	-	30.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	0,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	-		30.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang</i>	-			100 Persen	75.486.500,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN SATPOL PP	-	82.203.648,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	15.600.000,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN SATPOL PP		26.218.800,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	44.080.000,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN SATPOL PP		44.080.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	15.806.500,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN SATPOL PP		11.904.848,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang terpelihara</i>	-			100 Persen	227.998.600,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP	-	512.158.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				18 Unit	207.113.600,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		453.568.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	1.460.000,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Ulu Benteng	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	19.425.000,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		46.589.400,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	0,00	Kab. Barito Kuala, Marabahan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3</i>	65 Persen			65 Persen	1.377.403.050,00						65 Persen	1.817.540.310,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kecamatan yang diawasi</i>	-			100 Persen	1.229.568.050,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP	-	1.669.731.390,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	143.177.875,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		137.358.975,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>				12 Dokumen	55.080.725,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		55.091.965,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			<i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				30 Orang	65.068.950,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		340.091.900,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</i>				4 Dokumen	81.864.750,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		328.445.625,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i>				12 laporan	205.775.750,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		71.138.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			<i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i>				6 Laporan	678.600.000,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		737.604.925,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	<i>Persentase Penurunan Pelanggaran Perda dan Perkada</i>	-			100 Persen	147.835.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat Dan ASN SATPOL PP	-	147.808.920,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>				12 Laporan	97.841.700,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat Dan ASN SATPOL PP		97.843.745,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i>				12 Laporan	49.993.300,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat Dan ASN SATPOL PP		49.965.175,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	<i>Persentase tingkat penyelesaian Pelanggaran K3</i>	65 Persen			65 Persen	54.769.490,00						65 Persen	199.777.960,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Penanggulangan Kebakaran</i>	-			100 Persen	54.769.490,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP	-	199.777.960,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>				4 Dokumen	54.769.490,00	Kab. Barito Kuala, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani	Masyarakat dan ASN Satpol PP		199.777.960,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
			JUMLAH					10.088.122.467,00							9.740.863.977,00	